



Yogya Rancang Pendidikan Tanpa Pungutan Hingga SMA

■ Yulianingsih

Pemkot Yogyakarta tahun ini tengah merancang sistem pendidikan tanpa pungutan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah (SMA/SMK). Bahkan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut di 2014 mendatang.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori mengatakan saat ini pihaknya memang tengah menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk mengkafer dana bagi pelaksanaan pendidikan tanpa pungutan di Kota Yogyakarta. "Kita baru susun, program ini baru akan diberlakukan 2014 mendatang," ujarnya.

Karena itu, kata dia, pungutan sekolah masih berlaku hingga akhir 2013. Pihaknya tengah menyiapkan sosialisasi ke sekolah terkait program tersebut.

Program tersebut, lanjut dia, tahap awal akan diberlakukan bagi siswa penduduk Kota Yogyakarta terlebih dahulu yang bersekolah di sekolah negeri di Yogyakarta.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, M Fauzan, me-

ngatakan program sekolah tanpa pungutan dari tingkat PAUD hingga SMA di Kota Yogyakarta merupakan kesepakatan antara pemkot setempat dan DPRD. Karenanya, kata dia, pemkot seharusnya segera melakukan sosialisasi sekolah bebas pungutan tersebut. "Baik itu biaya operasional berupa SPP maupun dana investasi, semuanya tidak boleh dipungut," katanya.

Diakuinya, selama ini program pendidikan gratis baru menyentuh hingga level SMP. Oleh karena itu pihaknya tengah memetakan kebutuhan anggaran pendidikan di jenjang SMA/SMK agar dapat dimasukkan dalam APBD 2014.

Hanya saja, sebagai langkah awal, program tersebut baru diperuntukkan bagi warga kota yang bersekolah di sekolah negeri.

Dari perhitungan awal, biaya operasional jenjang SMA mencapai Rp 15,9 miliar dan SMK Rp 8,8 miliar. Sedangkan dana investasi SMA sekitar Rp 5,05 miliar dan SMK Rp 4,9 miliar. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan mencapai Rp 34,802 miliar.

Jumlah tersebut diasumsikan dengan 5.740 warga kota bersekolah di SMA dan 4.500 siswa di SMK. "Kami tidak mau men-

dengar lagi ada keluhan siswa yang masih dibebankan pungutan. Jika ada keluhan, maka sekolah yang bersangkutan akan kami panggil," katanya.

Terpisah, Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta bersiap melakukan pemantauan terkait rencana pelaksanaan program tersebut. Baharuddin Kamba, Divisi Sekretariat dan Pengaduan Forpi Kota Yogyakarta, mengatakan pemantauan akan dilakukan untuk memastikan program itu benar-benar berjalan dengan baik.

"Kita juga siap menerima keluhan maupun pengaduan terkait dengan adanya pungutan dari pihak sekolah nantinya," katanya.

Pihaknya, kata Baharuddin, juga akan mendorong Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi program sekolah tanpa pungutan ini bukan hanya di sekolah tetapi juga ke warga Kota Yogyakarta hingga tingkat kelurahan.

"Hal ini penting agar masyarakat secara luas mengetahui program tersebut tidak hanya di kalangan atau lingkungan

sekolah saja, namun masyarakat secara luas dapat menerima informasi terkait dengan program tersebut secara komprehensif dan mudah mengakses informasi itu," ujarnya.

Forpi juga mendorong pihak sekolah untuk proaktif melakukan sosialisasi ke masyarakat. Forpi mendorong adanya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut baik berupa surat keputusan atau peraturan wali-kota, sehingga program ini cepat diberlakukan. ■

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005